

# DINAMIKA KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF DEMOGRAFI DAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

YB. Widodo\*

## *Abstract*

*The study on “The Labour Force Dynamic in the Perspective of Demographic and Social Economic Structural Change in West Lombok” is the early phase of the four years (2006-2009) study. The aim of this study is to analyze the employment growth and changes in demographic and social economic structure in West Lombok, using qualitative approach. The study uses the data gathered from samples of population villages on Sekotong District – West Lombok. This study shows, that to meet the pressing competition for capable manpower in the global economy, agroindustry must be developed in accordance with local potentials. This policy should create more jobs and increase the income and welfare of the local population. This problem needs to be addressed by adopting entirely new approaches to meet basic employment and income requirements for the larger segment of the district population. On the other hand, new methods can be devised to make market and institutional services more accessible to farmer’s welfare and labour market.*

**Keywords:** *Demography; employment; rural areas: West Lombok.*

---

Studi mengenai “Dinamika Ketenagakerjaan dalam Perspektif Perubahan Struktur Demografi dan Sosial Ekonomi di Kabupaten Lombok Barat” merupakan tahap awal dari serangkaian penelitian selama empat tahun (2006-2009). Tujuan studi ini adalah mengkaji pengembangan ketenagakerjaan di Lombok Barat dalam perspektif demografi dan sosial ekonomi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dengan mengambil sampel penduduk Desa Kecamatan Sekotong – Lombok Barat dan data sekunder diperoleh dari instansi setempat. Dari hasil studi tersebut, ditemukan bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Lombok Barat sangat kompleks, yaitu terkait dengan kondisi rendahnya kualitas tenaga kerja dan diperburuk dengan fakta semakin ketatnya persaingan tenaga kerja sejalan dengan perkembangan ekonomi global. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa salah satu cara untuk mengantisipasi semakin memburuknya masalah ketenagakerjaan dalam perkembangan ekonomi global adalah dengan mengembangkan agroindustri sesuai dengan potensi daerah Kabupaten Lombok Barat sehingga diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** Demografi; Ketenagakerjaan; Perdesaan, Lombok Barat.

---

\* Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI)

## PENDAHULUAN

Globalisasi yang ditandai dengan liberalisasi di bidang ekonomi, khususnya perdagangan internasional, diharapkan dapat membentuk suatu perekonomian dunia yang semakin terintegrasi. Namun, menurut Stiglitz (2002), mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan masalah sosial-ekonomi karena adanya kegagalan pasar (*market failures*) dan kegagalan pemerintahan (*government failures*) dalam menuntaskan masalah sosial seperti kesenjangan, pengangguran, pencemaran lingkungan (polusi), masalah pendidikan, dan kesehatan yang semua menuju tingkat kesejahteraan (*welfare*). Pandangan Stiglitz tersebut, sudah terjawab pada kejadian awal abad 21 ini dengan tanda-tanda perubahan iklim secara global dan diiringi krisis ekonomi global akibat dari sistem liberalisasi yang menjunjung tinggi keserakahan. Akhirnya, semua negara menanggung akibatnya. Oleh sebab itu, ada dua kekuatan yaitu kekuatan eksternal (globalisasi) dan kekuatan internal (desentralisasi) yang saling berinteraksi dalam perubahan lingkungan strategis yang akan mengubah tatanan paradigma pembangunan nasional (sosial, ekonomi, budaya, dan politik) bagi negara berkembang khususnya bagi negara Indonesia dewasa ini. Interaksi tersebut mengundang pertanyaan kekuatan internal apa yang sedang tumbuh di Indonesia setelah reformasi bergulir. Sementara itu, mayoritas penduduk di Indonesia masih dalam tatanan termarginalkan oleh kondisi ekonomi global tersebut.

Dampak pembangunan berkaitan dengan pengembangan Sumber daya manusia (SDM) adalah perubahan struktur ekonomi yang semakin mengarah pada makin berkembangnya sektor industri pengolahan dan jasa, sejalan dengan semakin berkurangnya peran sektor primer (pertanian) dalam kegiatan ekonomi (Ananta, Aris, 1997). Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai dalam proses pembangunan adalah terciptanya kesempatan kerja, baik dilihat dari peningkatan jumlah maupun kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap tambahan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Bertambahnya angkatan kerja tentu saja berpengaruh terhadap jumlah pencari kerja yang harus disertakan dalam kegiatan ekonomi (bekerja). Jumlah angkatan kerja yang besar merupakan potensi dalam percepatan pembangunan suatu wilayah. Namun demikian, jumlah yang besar juga berpotensi menjadi masalah atau beban pembangunan apabila kualitasnya tidak sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pertumbuhannya tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia.

Dilihat dari aspek ketenagakerjaan, Indonesia termasuk negara dengan surplus tenaga kerja. Hal ini berarti terdapat ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan ketersediaan kesempatan kerja. Dampak dari ketimpangan ini adalah timbulnya masalah pengangguran yang serius, baik pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran. Diperkirakan lebih dari separuh penduduk Indonesia termasuk penganggur atau setengah penganggur, sehingga menjadi salah satu isu pokok dalam pembangunan nasional. Berdasarkan berbagai data Sakernas dari BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dan diperkirakan mencapai sekitar

10% pada tahun 2004 (Widiyanto, 2005). Tingkat pengangguran lebih mencolok di kalangan penduduk usia muda, relatif berpendidikan, perempuan, dan tinggal di daerah perkotaan. Selain permasalahan terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, permasalahan ketenagakerjaan lainnya berkaitan dengan kualitas pekerjaan seperti masih dominannya pekerjaan di sektor informal, diabaikannya masalah keselamatan kerja, diskriminasi di tempat kerja, serta perbedaan tingkat upah/penghasilan.

Isu ketenagakerjaan lainnya, dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penguasaan keterampilan, secara empiris terlihat masih rendahnya kualitas tenaga kerja yang mendominasi ketenagakerjaan pada umumnya, terutama di tingkat perdesaan. Diperkirakan lebih dari separuh angkatan kerja (sekitar 55%) berpendidikan tamat Sekolah Dasar atau kurang, dan hanya sekitar 3% merupakan lulusan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan laporan tahunan tentang *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia ditempatkan pada posisi rendah dibandingkan negara-negara lain termasuk ASEAN (UNDP, 2005). Pada tahun 2003, posisi Indonesia, berada pada peringkat 110, hanya berada di atas negara-negara seperti Myanmar (131) dan Kamboja (130) di ASEAN. Pada tahun 2004, IPM Indonesia berada pada peringkat 111 dari 175 negara, satu tingkat di atas Vietnam. Nilai IPM antar provinsi sangat bervariasi, pada tahun 2002 Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi dengan nilai IPM terendah, sedangkan IPM tertinggi di Indonesia adalah DKI Jakarta (Tjiptoherijanto dan Nagib, 2008).

Dinamika yang berkaitan dengan pengembangan SDM adalah perubahan struktur ekonomi yang semakin mengarah pada makin berkembangnya sektor industri pengolahan dan jasa, sejalan dengan semakin berkurangnya peran sektor primer (pertanian) dalam kegiatan ekonomi. Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan sumber daya manusia. Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai dalam proses pembangunan adalah terciptanya kesempatan kerja, baik dilihat dari peningkatan jumlah maupun kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap tambahan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Bertambahnya angkatan kerja tentu saja berpengaruh terhadap jumlah pencari kerja yang harus disertakan dalam kegiatan ekonomi (bekerja). Jumlah angkatan kerja yang besar merupakan potensi dalam percepatan pembangunan suatu wilayah. Namun demikian, jumlah yang besar juga berpotensi menjadi masalah atau beban pembangunan apabila kualitasnya tidak sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pertumbuhannya tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia.

Tulisan ini merupakan salah satu hasil kajian DIPA tahun anggaran 2007 bidang Ketenagakerjaan PPK - LIPI yang bertujuan mengkaji pengembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Barat dalam kaitannya dengan perubahan struktur demografi dan sosial-ekonomi. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk mengkaji isu dan permasalahan ketenagakerjaan berkaitan dengan kebijakan dan program pembangunan di daerah.

## DINAMIKA KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF DEMOGRAFI

Keberhasilan Indonesia dalam mengurangi tingkat kelahiran penduduk dalam tiga dekade terakhir telah berdampak terhadap perubahan struktur penduduk Indonesia (*demographic transition*). Indikasi perubahan dapat dilihat dari bentuk piramida penduduk Indonesia yang sebelumnya (1970-an sampai 1980-an) didominasi oleh penduduk usia muda, dan sejak pertengahan tahun 1990-an cenderung mengarah pada meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk tua. Hal ini berarti telah terjadi pergeseran komposisi penduduk Indonesia dilihat dari segi umur penduduk (Moertiningsih, 2005).

Dalam jangka panjang, transisi demografi ini akan berdampak terhadap perubahan sosial ekonomi diantaranya: peningkatan jumlah tenaga kerja yang produktif, akumulasi kekayaan yang lebih besar, dan tersedianya modal manusia yang makin besar. Hal ini akan tercapai apabila terdapat kondisi yang mendukungnya, yaitu: *pertama* tersedia kesempatan kerja yang produktif sehingga mampu meningkatkan total *output* dari tenaga kerja. *Kedua*, terdapat tabungan masyarakat yang diinvestasikan secara produktif. *Ketiga*, terdapat kebijakan investasi yang khusus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif juga berarti rasio beban tanggungan keluarga akan semakin berkurang sehingga memberi peluang untuk mendapatkan bonus demografi, yang pada gilirannya dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Bonus demografi juga memberi peluang terbukanya *window opportunity* pada tahun 2020-2030, dimana rasio ketergantungan mencapai titik terendah (Moertiningsih, 2005). Namun demikian, kondisi tersebut akan menjadi masalah besar jika lapangan kerja dan penguasaan terhadap aset produktif, terutama untuk dapat bekerja tidak cukup memadai, baik di daerah maupun di tingkat nasional.

Pertumbuhan Penduduk di Provinsi NTB cenderung menurun dan relatif rendah dalam 15 tahun terakhir. Sebagai perbandingan pada periode 1990–2000 angka pertumbuhan 1,34%, dan pada periode berikutnya (2000–2004) mengalami penurunan sebesar 1,31% (Bappeda NTB, 2005; PBS, 2006). Demikian pula pembangunan sosial ekonomi NTB berdasarkan nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM) telah mengalami peningkatan yang cukup berarti dari 39 (tahun 1995) menjadi 62,4 (tahun 2005). Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa indikator penting seperti meningkatnya usia harapan hidup dari 55,0 (1995) menjadi 60,5 (2005), angka melek huruf dari 67,0 (1995) menjadi 79,0 (2005), angka pengeluaran per kapita dari Rp5.780.000,- (1996) menjadi Rp623.000,- (2005). Hal ini menunjukkan bahwa di NTB telah terjadi perbaikan indeks pembangunan manusia yang cukup mempunyai makna secara dinamis (Bappenas: Laporan MDG, 2007).

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lombok Barat cenderung semakin rendah karena dipengaruhi oleh semakin rendahnya angka kelahiran dan angka kematian ibu dan anak, di samping faktor migrasi keluar yang cukup tinggi, terutama sejak tahun 1994 banyak yang bekerja ke luar negeri (TKI). Dilihat dari tingkat kemajuan

pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM), Kabupaten Lombok Barat telah mengalami peningkatan dari 57 (2004) menjadi 57,8 (2005), namun tingkat kesejahteraannya termasuk menengah ke bawah. Dari segi pendidikan, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini, terjadi perubahan yaitu menurunnya proporsi penduduk yang bekerja dengan pendidikan rendah, sementara proporsi pekerja berpendidikan SLTP ke atas meningkat.

Perubahan struktur ketenagakerjaan lainnya adalah menurunnya proporsi penduduk yang bekerja sendiri (*self employed*) di Lombok Barat yang diikuti dengan peningkatan proporsi yang bekerja sebagai buruh. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pada kurun waktu tersebut, terkait dengan perkembangan ekonomi, penduduk berusaha sendiri menghadapinya. Pengangguran merupakan masalah utama di Kabupaten Lombok Barat, sementara sektor lain belum sepenuhnya dapat menampung pencari kerja yang semakin meningkat jumlahnya.

## **DINAMIKA KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI**

Berbagai gambaran di atas menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Kabupaten Lombok Barat menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan daerah ke depan terutama terkait dengan aspek ketenagakerjaan. Tantangan ini semakin berat karena transisi ekonomi dan demografi yang berkaitan dengan pengembangan SDM adalah meningkatnya jumlah pencari kerja yang mayoritas penduduk usia muda tidak diimbangi dengan perubahan struktur ekonomi. Sektor Industri pengolahan dan jasa tidak berkembang sementara peran sektor primer (pertanian) dalam kegiatan ekonomi semakin berkurang. NTB khususnya Lombok Barat belum berhasil sepenuhnya mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 (Widodo, YB., 2007). Dampak krisis ini memperburuk kondisi daya saing SDM yang diindikasikan semakin menurun kualitasnya akibat meningkatnya jumlah penduduk yang relatif miskin dan tidak produktif (penganggur). Apabila keadaan ini terus berlanjut, dikhawatirkan bonus demografi semakin sulit diraih, bahkan sebaliknya berpotensi semakin menjadi beban pembangunan.

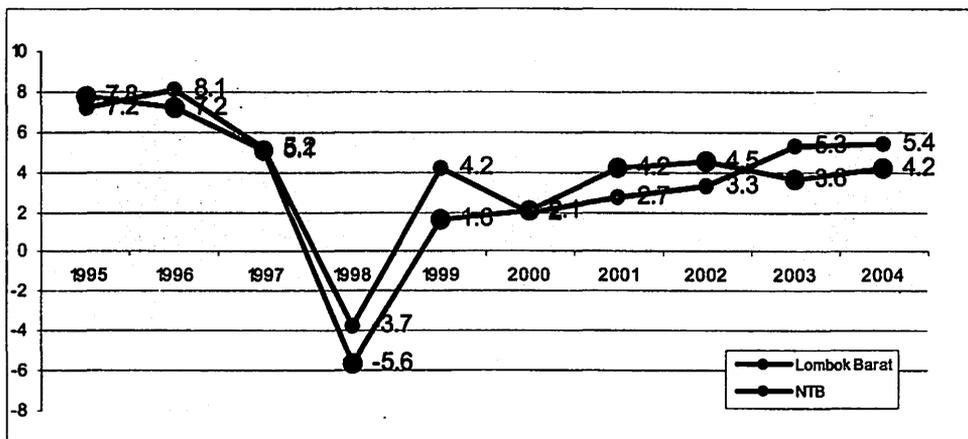
Perkembangan ekonomi daerah dapat dilihat dengan menggunakan berbagai indikator salah satunya adalah tren pertumbuhan ekonomi riil daerah pada periode tertentu. Indikator ini diperoleh berdasarkan besaran pendapatan regional daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB riil merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah pada periode tertentu dan biasanya ditinjau atas dasar pendekatan harga konstan. Pendekatan ini menggunakan tahun tertentu sebagai tahun dasar perhitungan sehingga menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi) dalam kurun waktu tertentu. Pendekatan ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar mencerminkan adanya kenaikan atau penurunan pendapatan. Artinya, meningkatnya laju PDRB suatu daerah sekaligus menunjukkan terjadinya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Begitupun sebaliknya, terjadinya penurunan

laju pertumbuhan ekonomi berarti terjadi penurunan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit usaha ekonomi yang terlibat dalam perekonomian suatu daerah.

Beberapa faktor internal yang diketahui sangat mempengaruhi tren laju pertumbuhan ekonomi suatu negara (daerah) diantaranya adalah kondisi struktur perekonomian (dalam hal ini termasuk juga SDA dan kualitas SDM), perkembangan investasi baik PMA maupun PMDN, kegiatan ekspor impor, iklim usaha (regulasi, jaminan hukum dan keamanan), serta stabilitas sosial dan politik. Sementara itu, faktor-faktor seperti kondisi ekonomi dunia, stabilitas kondisi sosial politik regional, dan perdagangan bebas (globalisasi dan kesepakatan internasional) merupakan variabel yang diakui sangat kuat mempengaruhi kondisi tren pertumbuhan ekonomi suatu negara (daerah).

Grafik 1, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Lombok Barat pada periode 1995–2005 mengalami fluktuasi yang cukup berarti. Puncak pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat terjadi pada periode 1995–1996. Pada tahun tersebut laju pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 8,1%, sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat pada tahun 1995 mencapai 7,2%.

Tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1995 diduga terkait dengan pengaruh peningkatan kegiatan investasi di sektor pariwisata dan peningkatan kunjungan kegiatan pariwisata di Propinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Pada tataran nasional, pada tahun tersebut penanaman modal mendominasi sekitar 30% pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Meningkatnya investasi yang masuk ke Indonesia diduga juga berpengaruh positif terhadap performa perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Lombok Barat.



**Grafik 1.** Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 1995-2004 Berdasarkan Harga Konstan 1993<sup>1</sup>

Sumber: Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 1995-1994, BPS.2006

Grafik 1 tersebut juga menunjukkan bahwa krisis perekonomian nasional yang terjadi pada tahun 1997–1988 berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Provinsi NTB dan Lombok sehingga laju pertumbuhan ekonomi merosot tajam. Terbukti pada tahun 1998 laju pertumbuhan Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat mencapai titik terendah yaitu –5,6% dan –3,7%. Namun demikian, tingkat penurunannya tetap lebih rendah dibandingkan dengan kondisi laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai –13,7%.

Dua tahun setelah krisis ekonomi tahun 1997–1998, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat menunjukkan perbaikan yang berarti. Pada tahun 2002, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat kembali meningkat, masing-masing sebesar 4,5% dan 3,3%. Walaupun nilai tersebut masih jauh di bawah prestasi ekonomi yang pernah terjadi pada tahun 1995 setidaknya kondisi tersebut memperlihatkan indikasi adanya perbaikan ekonomi daerah ini untuk masa mendatang

Dilihat dari aspek ketenagakerjaan, di Kabupaten Lombok Barat telah terjadi surplus tenaga kerja, ini berarti terdapat ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan ketersediaan kesempatan kerja (Widodo, Y.B. 2007). Dampak dari ketimpangan ini adalah timbulnya masalah pengangguran yang serius, baik pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran. Berdasarkan data *National Human Development Report 2004*, tingkat pengangguran terbuka di NTB adalah sebesar 8,9%, sedangkan di Kabupaten Lombok Barat sebesar 10,4% (BPS, IPM 2004–2005). Keadaan ini hampir sama dengan kondisi di Indonesia yaitu sebesar 10,6%, dan pada tahun terakhir ada kecenderungan terus mengalami peningkatan. Tingkat pengangguran lebih mencolok di daerah perkotaan, seperti kota Mataram yaitu sebesar 13,4%.

Selain permasalahan terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, permasalahan ketenagakerjaan lainnya berkaitan dengan kualitas pekerjaan masih didominasi oleh sektor informal, masalah keselamatan kerja dan diskriminasi tempat kerja, serta masalah kecukupan upah/penghasilan. Permasalahan ketenagakerjaan tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di berbagai wilayah, terutama setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997. Tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun yang sama adalah sebesar 27,8% dan di Kabupaten Lombok Barat jauh lebih tinggi yaitu sebesar 33,1%. Sebaliknya, tingkat kemiskinan di Kota Mataram jauh lebih rendah yaitu sebesar 12,8%.

Selama kurun waktu 2000–2004 perekonomian Kabupaten Lombok Barat didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, hotel, restoran, dan sektor jasa (Tabel 1). Ketiga sektor tersebut merupakan sektor unggulan dalam proses pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan, merupakan *leading sector* daerah ini karena kontribusinya mencapai sekitar 30%

---

<sup>1</sup> Sejak tahun 2000 Laju Pertumbuhan dihitung berdasarkan tahun dasar tahun 2000.

terhadap total penciptaan PDRB Kabupaten Lombok Barat. Sektor lain yang juga memberi kontribusi cukup besar adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran (20%) serta sektor jasa sekitar 15% pengangkutan dan komunikasi (13%).

**Tabel 1.** Struktur Perekonomian Kabupaten Lombok Barat Pada Tahun 2002–2004

Sektor	2002	2003	2004
1. Pertanian	32,59	31,92	31,47
2. Pertambangan dan Penggalian	3,71	3,75	3,76
3. Industri Pengolahan	3,65	3,73	3,80
4. Listrik, Gas dan Air	0,59	0,60	0,60
5. Bangunan	9,64	9,83	9,90
6. Perdagangan, Hotel & Restoran			
7. Pengangkutan dan Komunikasi	20,75	21,12	21,43
8. Keuangan dan Persewaan	12,23	12,49	12,73
9. Jasa-jasa	2,40	2,43	2,46
	14,44	14,13	13,83
- (%)	100,0	100,0	100,0
- Rp Juta	627.583,43	653.619,76	685.247,99

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Barat 2005 BPS Kabupaten Lombok Barat 2005

Struktur ekonomi daerah menunjukkan sektor-sektor apa saja yang menjadi penyumbang PDRB daerah. Semakin besar kontribusi suatu sektor dalam perekonomian daerah dipastikan sektor tersebut memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Oleh karena itu tidak salah jika penetapan suatu sektor yang menjadi unggulan dalam perekonomian daerah juga memasukkan kontribusi sektoral sebagai salah satu bahan pertimbangan (Nawawi, dalam Widodo, dkk., 2006).

## MODAL DASAR EKONOMI LOMBOK BARAT

Sarana dan prasarana pembangunan merupakan salah satu faktor penting dan mutlak perlu disediakan dalam pelaksanaan pengembangan suatu wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mendukung kelancaran kegiatan pembangunan. Sarana dan prasarana yang sangat penting keberadaannya antara lain sarana ekonomi (perbankan, koperasi, dan lembaga non perbankan), transportasi, komunikasi, dan perdagangan. Semakin banyak tersedia sarana dan prasarana tersebut, akan mempercepat jalannya proses pembangunan. Berikut ini ulasan sebagian sarana dan prasarana yang tersedia di Kabupaten Lombok Barat dan dianggap sangat mendukung proses pembangunan ekonomi di daerah ini.

## **Lembaga Perbankan**

Gambaran tentang lembaga perbankan di Lombok Barat tidak terlepas dari peranan kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB yang lokasinya termasuk Kabupaten Lombok Barat. Lembaga perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian daerah. Peran lembaga keuangan dapat memperlancar kegiatan ekonomi sekaligus sebagai media mediasi antara kebutuhan berusaha dan pengembangan usaha. Seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh daerah, tantangan untuk meningkatkan peranan sistem keuangan, dalam hal ini lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, juga semakin besar. Lembaga keuangan seperti perbankan dituntut untuk dapat lebih meningkatkan fungsinya sebagai intermediasi dalam aktifitas keuangan masyarakat daerah. Berdasarkan jumlah penyebarannya, hingga tahun 2005 sebagian besar kegiatan pelayanan perbankan di Provinsi NTB terpusat di Kota Mataram. Hal tersebut dapat dipahami karena Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi NTB. Dari 188 unit lembaga perbankan yang ada di Provinsi tersebut, sekitar 38 unit bank berada di Kota Mataram dan 26 unit di Kabupaten Lombok Barat. Lebih dari separuh lembaga keuangan mikro (sekitar 60%) berada di Kota Mataram (Tabel 2).

**Tabel 2.** Status Pemilikan Lembaga Keuangan Daerah dan Perbankan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perbankan (Unit)			Lembaga Keuangan Mikro
		Milik Daerah	Milik Pemerintah	Milik Swasta*)	
1	Lombok Barat	9	9	8	-
2	Lombok Tengah	11	12	4	-
3	Lombok Timur	12	13	5	-
4	Sumbawa	14	15	5	-
5	Dompu	6	6	-	14
6	Bima	10	9	2	1
7	Kota Mataram	6	12	20	23
8	Kota Bima	-	-	-	-
9	Sumbawa Barat	-	-	-	-
	Jumlah	68	76	44	38

Sumber: Bank Indonesia Cabang Mataram, 2005.

Keterangan: dan \*) Termasuk 4 Buah Bank Syariah

## **Koperasi**

Koperasi merupakan bagian dari lembaga keuangan yang menyentuh masyarakat banyak dan memiliki potensi penting untuk menunjang tumbuh kembangnya

perekonomian suatu daerah. Selama ini, koperasi dapat tetap tumbuh karena lembaga tersebut pada intinya dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dan berorientasi bagi kesejahteraan anggotanya. Beberapa daerah di Indonesia terutama di daerah perdesaan, peran koperasi sangat penting terutama dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana produksi serta kelancaran penyediaan arus barang dan jasa. Dalam operasional koperasi biasanya menjalin kerjasama dengan pihak perbankan sehingga masing-masing pihak memiliki peran tersendiri dalam menunjang pengembangan ekonomi suatu daerah.

Jumlah koperasi di NTB hingga tahun 2005 sekitar 2.472 buah, dengan jumlah anggota mencapai 525.333 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar (45%) koperasi di Provinsi NTB terpusat di Kabupaten Lombok Barat dengan tingkat penyebaran terbesar berada di kota Mataram, dan selebihnya di wilayah kecamatan Kabupaten Lombok Barat (Tabel 3). Sebagian besar koperasi yang masih aktif adalah koperasi primer dengan usaha utama unit simpan pinjam dan penyediaan sarana produksi pertanian. Diharapkan di masa mendatang dukungan pemerintah daerah setempat dan lembaga keuangan perbankan terhadap eksistensi koperasi di daerah ini terus meningkat sehingga dapat membantu berbagai kegiatan usaha masyarakat terutama kebutuhan pendanaan/modal.

**Tabel 3.** Perkembangan Koperasi di Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2003–2005

Daerah	2003	2004	2005
Jumlah Koperasi	354	371	371
Jumlah Anggota	90.541	91.158	91.158
Modal Sendiri (Rp.000)	16.361.800	16.361.800	18.812.791
Modal Luar (Rp.000)	30.322.224	36.024.718	36.025.000

Sumber: Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka, 2005

Untuk sektor pertanian, sub sektor yang memberikan andil cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Lombok Barat adalah sektor pertanian tanaman pangan (padi) dan tanaman perkebunan (biji mete, mete osse dan tepung carragenan). Hasil pertanian seperti biji mete dan mete osse merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada sektor perdagangan, kegiatan usaha yang memberikan kontribusi besar dalam kegiatan ekonomi daerah ini adalah perdagangan hasil kerajinan seperti kerajinan tenun, gerabah, anyaman, pengolahan pangan, perhiasan (mutiara), dan cinderamata.

## MODAL DASAR MANUSIA LOMBOK BARAT

*Human Capital* atau modal manusia, pada dasarnya merupakan konsep barat tentang sumber daya manusia yang dipopulerkan oleh dua ekonom Amerika Serikat yang bernama Garry Becker dan Theodore Schutz (Tirtosudarmo, 2007). Konsep tersebut berawal dari sebuah hipotesa bahwa, keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang diperlihatkan dengan meningkatnya pendapatan pekerjaan merupakan dampak dari kemajuan pendidikan dan tingkat kesehatan penduduk. Oleh karena itu muncul pendapat yang kuat bahwa untuk memajukan perekonomian suatu bangsa atau penduduk sebagai anggota masyarakat diperlukan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan yang nota bene merupakan investasi sumber daya manusia (SDM).

Teori tersebut telah diperbarui oleh McConnell and Brue (Tirtosudarmo, 2007) yang menyebutkan bahwa investasi modal insani (*human capital investment*) meliputi pengeluaran untuk pendidikan formal, pelatihan dalam kerja, pemeliharaan kesehatan bahkan migrasi dan proses pencarian kerja. Oleh sebab itu, jika seseorang mengeluarkan biaya untuk pendidikan dan kesehatan maka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang akan memperbesar pendapatan pada waktu mendatang. Investasi modal insani juga dapat mengatasi berbagai karakteristik angkatan kerja yang menghalangi pencapaian produktivitas lebih tinggi, seperti buruknya kondisi kesehatan, buta huruf, tidak mudah menerima dan memahami pengetahuan baru, takut menghadapi perubahan, kurang respon terhadap insentif, dan tidak mudah berpindah tempat (migrasi).

Mengacu pada teori di atas maka ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan dan lembaga ekonomi merupakan faktor penting bagi kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta untuk pengembangan wilayah. Tidak semua sarana dapat tersaji dalam laporan ini, akan tetapi hanya terbatas pada kriteria sarana penting dan utama, seperti pendidikan, kesehatan dan lembaga ekonomi, seperti perbankan dan koperasi, yang menjadi sarana peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar.

Sarana pendidikan di Kabupaten Lombok Barat meliputi sarana pendidikan dari SD hingga Perguruan tinggi. Adapun jumlah sarana pendidikan yang tersedia 450 sekolah SD, 47 SLTP, dan 24 sekolah tingkat SLTA. Berdasarkan rasio jumlah murid dan jumlah sarana yang tersedia di kabupaten Lombok Barat relatif sudah memadai (Tabel 4). Semua rasio jumlah murid terhadap jumlah guru sudah cukup baik, hampir semuanya telah di bawah 25. Rasio murid terhadap jumlah sekolah untuk SMU dan SLTP sudah cukup baik. Sebaliknya, khusus untuk SMK ternyata rata-rata rasio murid terhadap sekolah masih tinggi, yakni masih diatas 500 sehingga masih sangat memerlukan tambahan jumlah sekolah di tingkat SMK tersebut. Untuk mendukung program kepariwisataan di kabupaten ini telah dibangun sebuah sekolah swasta yaitu, Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata (SMIP). Hasil lulusan sekolah tersebut telah dimanfaatkan oleh sektor-sektor pariwisata, seperti perhotelan dan perdagangan.

**Tabel 4. Jumlah Sekolah, Kelas, Guru, Murid dan Rasio Murid/Sekolah, Murid/Guru, Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2005**

Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Murid/Sekolah	Murid/Guru
Sekolah Dasar	450	4.395	94.252	209	21
SLTP	47	1 339	22.866	486	17
SMU	24	749	9.886	412	13
SMK	2	277	2.225	1112	8

Sumber : Diolah dari data Kab. Lombok Barat Dalam Angka, 2005.

Bagaimanapun idealnya kebijakan pendidikan di atas, masih banyak orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah anak-anak mereka. Meskipun ada kebijakan pembebasan uang SPP, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dana yang dianggarkan Pemerintah untuk pendidikan sangat terbatas sehingga tidak cukup dana untuk pembangunan dan perbaikan gedung sekolah, gaji guru, buku pelajaran/buku bacaan, dan alat tulis. Akibatnya, target penambahan jumlah sekolah dasar tidak pernah tercapai. Masalah pendidikan lainnya yang tidak kalah rumit adalah tidak tertampungnya lulusan sekolah dasar dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kondisi pendidikan di Lombok Barat merupakan salah satu contoh keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia yang sangat menghambat pengembangan sumber daya manusia. Investasi pemerintah dalam penyediaan sarana dan pelayanan pendidikan masih rendah. Sebagai perbandingan, dalam PDB investasi publik di bidang pendidikan kurang dari 20%. Ini jauh lebih rendah dari rata-rata investasi yang dikeluarkan negara berkembang lain (Handayani, 2007: 171). Pembelanjaan publik yang rendah ini harus diimbangi dengan pembelanjaan swasta yang lebih tinggi. Namun demikian, yang terjadi adalah penentuan status sekolah negeri unggulan yang dikelola secara mandiri menyamai sekolah swasta membuat biaya siswa untuk bersekolah di sekolah unggulan sangat tinggi, dan jelas tak terjangkau oleh anak-anak dari kalangan penduduk berpenghasilan menengah dan rendah. Akibatnya, terjadi ketimpangan yang semakin lebar antara penduduk kaya dan penduduk miskin dalam pemenuhan hak pendidikan anak.

Masalah pokok kesehatan di Lombok Barat hampir sama, yaitu masih rendahnya angka harapan hidup yang baru mencapai 58,4 (2005) dibanding Provinsi NTB yaitu sebesar 60,5 (2005). Adapun angka harapan hidup tingkat Nasional sudah lebih tinggi yaitu mencapai 68,1. Dengan demikian, investasi di bidang kesehatan di Kabupaten Lombok Barat merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sehingga diperlukan pemenuhan sarana kesehatan yang memadai. Sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Lombok Barat antara lain sebuah Rumah Sakit Umum (RSU), 19 Puskesmas dan 75 Puskesmas Pembantu, dan 6 buah apotek. Di daerah ini juga telah tersedia 46 orang dokter umum dan 273 paramedis (Tabel 5).

**Tabel 5. Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis, Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2005**

Jenis	Jumlah
Rumah Sakit Umum (RSU)	1
Rumah Sakit Jiwa	-
BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak)	-
Puskesmas	19
Puskesmas Pembantu	75
Apotik	6
Balai Pengobatan Swasta	7
BKIA Swasta	-
Dokter Spesialis	2
Dokter Umum	46
Dokter Gigi	21
Paramedis	273

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Barat, 2005.

Berdasarkan jenis dan jumlah sarana kesehatan, nampaknya relatif cukup bervariasi dan banyak. Namun, sarana kesehatan di daerah ini masih perlu ditingkatkan, terutama untuk kelengkapan medis yang berkaitan dengan jenis penyakit yang sering terjadi. Hal ini perlu dilakukan, sebab tersedianya berbagai sarana kesehatan yang cukup memadai diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit yang sering timbul di masyarakat. Dengan demikian untuk lebih meningkatkan kesehatan penduduk, perlu kiranya diusahakan tersedianya dokter-dokter spesialis, seperti dokter mata, dokter penyakit dalam serta dokter kandungan. Tersedianya dokter-dokter spesialis tersebut sangat membantu masyarakat di wilayah tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan animo masyarakat untuk menindaklanjuti upaya mengatasi berbagai penyakit yang sering terjadi.

#### **STUDI KASUS: DINAMIKA KETENAGAKERJAAN DI KECAMATAN SEKOTONG**

Sekotong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang mayoritas penduduknya hidup di wilayah perdesaan. Sebagai daerah perdesaan, sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi pada struktur ekonomi di kecamatan tersebut, yaitu sekitar 60%, terutama dari sub sektor tanaman pangan. Sektor berikutnya adalah perdagangan, hotel dan restoran (13,9%) serta sektor jasa (8,1%). Hal ini menunjukkan bahwa pertanian masih mendominasi perekonomian kecamatan tersebut, sedangkan sektor yang dapat dikembangkan adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran (Tabel 6). Secara keseluruhan tingkat pertumbuhan ekonomi riil sebesar 4,8% (2002–2005).

**Tabel 6. Struktur Perekonomian Menurut Sektor Kecamatan Sekotong 2002–2005 (%)**

Sektor	2002	2004	2005
1. Pertanian	58,37	57,44	57,17
2. Pertambangan dan Penggalian	2,50	2,51	2,58
3. Industri Pengolahan	3,10	3,22	3,20
4. Listrik, Gas dan Air	0,03	0,03	0,03
5. Bangunan	6,40	6,67	6,83
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	16,07	16,57	16,75
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2,44	2,46	2,47
8. Keuangan dan Persewaan	2,52	3,75	3,74
9. Jasa-jasa	7,58	7,35	7,23
Total	100,0 (Rp98.111.844)	100,0 (Rp107.296.655)	100,0 (Rp122.531.528)

Sumber Lombok Barat dalam Angka tahun 2002-2004, BPS Kabupaten Lombok Barat 2005

Sebagian besar wilayah kecamatan tersebut merupakan kawasan pegunungan kapur dan kawasan pantai. Jarak kota kecamatan dengan ibukota kabupaten sekitar 40 km, sedangkan luas wilayah Kecamatan Sekotong sekitar 31.097 ha. Potensi sumber daya alam terdiri dari lahan yang bisa digunakan yaitu seluas 16.552 ha (53%) dan selebihnya berupa tanah hutan negara yang terletak di lereng pegunungan, serta tanah padas yang merupakan bahan tambang batu granit yang belum dikelola secara ekonomis. Potensi sumber daya alam berupa lahan yang dapat digunakan sebesar 83% berupa lahan kering terletak di lereng tebing atau pegunungan, selebihnya tanah sawah hanya 10%, sisanya tanah pekarangan dan tegalan 7%. Dengan demikian dengan kondisi lahan, menunjukkan betapa miskinnya kondisi daerah tersebut (Kecamatan Sekotong Dalam Angka, 2005).

Kondisi sumber daya alam menurut penggunaan tanah di Kecamatan Sekotong tidak berbeda jauh dengan kondisi ditingkat kabupaten, yang mayoritas luas tanahnya berupa ladang/huma 36,4%, kebun/tegalan 26,4% dan luas hutan negara 21,6% (Tabel 7), serta luas sawah 10%. Adapun komoditas utama di Kecamatan Sekotong adalah kelapa dan jambu mete. Kedua jenis komoditas tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan pasar regional yang berpusat di kota Mataram. Sedangkan jenis sumber daya alam laut lepas yang dapat dikembangkan adalah jenis ikan laut seperti ikan tuna, ikan laut segar, cumi, dan pengembangan tambak udang dan tambak bandeng. Dalam pengembangan selanjutnya, jenis ikan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan adalah udang dan bandeng.

**Tabel 7. Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaan Di Kecamatan Sekotong Tahun 2005**

Penggunaan Tanah	Luas	
	Ha	Persen
1. Pekarangan/Bangunan	188	0,6
2. Sawah	3129	10,0
3. Kebun/Tegalan	8262	26,4
4. Ladang/Huma	11.392	36,4
5. Padang Penggembalaan	282	0,9
6. Hutan Rakyat	486	1,5
7. Hutan Negara	6.760	21,6
8. Perkebunan	-	-
9. Lainnya (rawa)	102	1,8
10. Tambak	25	0,8
11. Kolam/Empang	-	-
Total	31.297	100

Sumber: Lombok Barat dalam Angka, BPS Lombok Barat 2005

Berdasarkan data Kecamatan Sekotong Dalam Angka tahun 2005, kerajinan pendukung kegiatan pariwisata merupakan kegiatan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Industri kecil yang ada di Kecamatan Sekotong sangat berkaitan erat dengan bahan baku yang ada di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah tersebut terdapat jenis komoditas penting yang merupakan unggulan ekspor Kabupaten Lombok Barat. Seperti bahan baku kayu, bambu dan rotan merupakan hasil dari hutan. Batu Aji membutuhkan bahan tambang di sekitar pegunungan. Dengan demikian sangat mendukung kegiatan perekonomian yang terpusat di Lombok Barat terutama di Kota Mataram dan mempunyai dampak positif terhadap peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah kabupaten yang lain sehingga akan dapat menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan penduduk di Kecamatan Sekotong. Usaha kerajinan yang menonjol di daerah ini adalah industri mebel kayu (183 unit) dan mebel bambu (105 unit) (Tabel 8).

**Tabel 8. Jenis dan Jumlah Industri Kecil di Kecamatan Sekotong, Tahun 2005**

No	Jenis Industri Kecil	Jumlah (unit)
1	Ukiran Kayu	5
2	Kerajinan Kerang	4
3	Mebel kayu	183
4	Mebel Bambu	105
5	Tikar Rotan	46
6	Gerabah	25
7	Batu Aji	14
8	Tenun Gedongan	10

Sumber: Kecamatan Sekotong Dalam Angka, 2005

Meningkatnya perekonomian di Kota Mataram juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian wilayah Kecamatan Lombok Barat. Kondisi ini ada hubungannya dengan peranan perekonomian yang ada di Lombok Barat yang didominasi oleh sektor jasa. Sektor jasa cukup berarti dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian di daerah ini, terutama jasa bidang pariwisata. Pemerintah Daerah Provinsi NTB telah mencanangkan bahwa NTB khususnya Pulau Lombok sebagai daerah tujuan wisata. Kegiatan pariwisata di samping mendatangkan devisa, mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari sarana perekonomian yang ada di Kecamatan Sekotong. Berdasarkan data Sekotong Dalam Angka tahun 2005, di daerah tersebut terdapat 5 pasar umum yang tersebar di wilayah perdesaan. Khusus sarana perhotelan dan akomodasi sebanyak 4 buah terdapat di Desa Pelangan. Desa tersebut menjadi salah satu desa penelitian, dan wilayah tersebut menjadi tempat berkembangnya obyek pariwisata. Di desa tersebut juga sedang dikembangkan agro industri mutiara air laut yang mendapat modal usaha dari investor Jepang.

### Kondisi Ekonomi Rumah Tangga

Bekerja merupakan kegiatan utama dalam rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi keluarganya. Pada umumnya penduduk usia kerja, terutama yang masih berusia produktif akan berusaha mendapatkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan pribadi atau keluarga. Proporsi penduduk yang bekerja dapat dilihat dari berapa banyak jumlah angkatan kerja dalam rumah tangga yang bekerja dan sedang mencari kerja. Oleh sebab itu, beban tanggungan penduduk akan semakin berat bila proporsi penduduk muda dan lansia proporsinya semakin meningkat. Sementara itu, besarnya penduduk usia produktif akan menguntungkan bila mereka cukup produktif dan ditopang pertumbuhan ekonomi daerah yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan.

Tabel 9. Kegiatan Utama Anggota Rumah Tangga di Kecamatan Sekotong, 2007

No	Kegiatan Utama	Persen
1	Bekerja	45,8
2	Menganggur	21,7
3	Sekolah	17,5
4	Mengurus RT	15,0
5	Lain-lain	-
Total (persen/N)		100 (948)
TPAK		67,5
Tingkat Pengangguran		32,2

Sumber: Data survei, PPK – LIPI 2007

Proporsi anggota rumah tangga yang bekerja di Kecamatan Sekotong relatif sangat rendah (kurang dari 50 %). Hal ini disebabkan karena proporsi angkatan kerja yang mencari pekerjaan (pengangguran) relatif tinggi yaitu sekitar 22%. Proporsi anggota rumah tangga yang mengurus rumah tangga di Sekotong jauh lebih rendah hanya sebesar 15,0% (Tabel 9).

Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan sulitnya mencari pekerjaan, terutama sejak krisis ekonomi hingga saat ini. Kegiatan mengurus rumah tangga merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan karena tidak ada kesempatan yang lain. Keadaan ini menunjukkan bahwa secara riil angka partisipasi angkatan kerja di wilayah tersebut sangat rendah, masing-masing masih dibawah 70%. Artinya, perkembangan perekonomian di NTB dan khususnya Lombok Barat, pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di daerah tersebut, dan diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja, akan tetapi belum dapat secara penuh dapat menyerap angkatan kerja di kecamatan tersebut. Kemungkinan lain, adalah lapangan pekerjaan seperti sektor pertanian, sektor perdagangan atau penjualan. Kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu alternatif lapangan usaha yang mudah dilakukan dan modal usaha yang dibutuhkan tidak terlalu besar serta mudah didapat melalui bank juga dari saudara atau kenalan. Di samping itu, kegiatan ekonomi lainnya seperti bekerja sebagai TKI ke luar negeri juga ikut meramaikan kinerja perekonomian daerah, akan tetapi belum juga menjawab kebutuhan daerah penelitian tersebut.

### **Pendapatan Rumah Tangga**

Gambaran mengenai pendapatan rumah tangga di Kecamatan Sekotong dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini.

**Tabel 10.** Distribusi Persentase Pendapatan Rumah Tangga Desa Sekotong Tengah dan pelanggan-kabupaten Lombok Barat (per bulan) (persen)

No	Pendapatan Rumah Tangga (Rp)	Sekotong Tengah (kota)	Pelangan (desa)	Sekotong Tengah dan Pelangan
1	< 600.000	73,5	10,6	22,0
2	600.000 – 1.200.000	15,3	17,5	37,4
3	1.200.000 – 1.800.000	4,6	28,6	16,6
4	1.800.000 – 2.400.000	3,3	22,0	11,7
5	2.400.000 – 3.000.000	2,0	15,3	8,7
6	3.000.000 +	1,3	6,0	3,6
	<b>Persen (N)</b>	<b>100,0 150</b>	<b>100,0 150</b>	<b>100,0 300</b>

Sumber : Data Survei Kecamatan Sekotong, PPK-LIPI, 2007

Distribusi pendapatan (per bulan atau kurang) penduduk di Sekotong mengelompok pada kisaran Rp1.200.000,-; yaitu sebesar 59,4% rumah tangga, sedangkan sebesar 40,6% rumah tangga menerima di atas Rp1.200.000,- atau lebih. Dengan demikian, rata-rata pendapatan rumah tangga Kecamatan Sekotong sebesar Rp912.924,-. Apabila dilihat secara mendalam maka di Sekotong terjadi perbedaan yang sangat mencolok, dengan pendapatan minimum adalah Rp16.150,- dan pendapatan maksimum adalah Rp19.300.000,-. Angka tersebut menunjukkan telah terjadi tingkat ketimpangan yang sangat tinggi. Gambaran kondisi pendapatan rumah tangga tersebut tidak menunjukkan kaitan dengan jumlah anggota pada masing-masing rumah tangga atau semakin tinggi pendapatan, tidak berarti jumlah anggota rumah tangga semakin besar. Karenanya di daerah penelitian tersebut mayoritas rumah tangga rata-rata mempunyai anggota rumah tangga 2 orang, atau dengan kata lain sebagian besar adalah merupakan keluarga kecil.

Kecamatan Sekotong sebagai daerah penelitian memang merupakan wilayah miskin secara absolut, karena kondisi alam dan sumber daya alam yang sangat terbatas. Adapun sektor yang dapat dikembangkan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, merupakan indikasi penting bagi tumbuhnya bidang jasa pariwisata, walaupun pada sektor tersebut belum secara langsung dapat bermanfaat bagi penyerapan tenaga kerja di kedua desa tersebut. Hal ini disebabkan faktor pendidikan relatif masih sangat rendah sehingga generasi muda atau anak-anak masih sangat tertinggal. Kesempatan kerja yang tumbuh di desa tersebut justru diisi oleh tenaga kerja dari luar desa, misalnya dari penduduk kota Mataram atau penduduk daerah lain (hasil wawancara dengan kelompok pemuda). Sektor jasa yang berkembang di kecamatan Sekotong juga masih diisi oleh tenaga kerja dari lain daerah, terutama para migran.

Kemiskinan struktural terjadi karena mayoritas adalah petani penggarap (baik tanah sawah, sapi, ternak lainnya) sehingga menciptakan ketidakberdayaan ekonomi mereka dan sangat tergantung pada tuan tanah, serta pemberi modal usaha. Kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengangkat kehidupan ekonomi mereka adalah meningkatkan kemandirian ekonomi dengan jalan membentuk suatu kelompok usaha bersama yang tumbuh dari mereka, seperti membuat bahan kerajinan (industri rumah tangga) untuk kebutuhan pariwisata. Sudah ada pula yang membuat atap dari bahan alang-alang hutan, semacam rumbai, untuk dikirim ke Bali atau luar negeri, namun tidak ada dorongan bantuan dari pemerintah. Perhatian justru datang dari kelompok lembaga swadaya masyarakat yang mendapat bantuan dari pihak asing.

## **PENUTUP**

Dinamika kependudukan ini, ditandai dengan rendahnya pertumbuhan penduduk tahun 1990–2004 di Lombok Barat per tahun adalah 1,4%, jauh lebih rendah dari NTB yang secara keseluruhan yaitu sebesar 1,7%. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya pertumbuhan penduduk di Lombok Barat adalah adanya kecenderungan

makin rendahnya angka kelahiran dan angka kematian ibu dan anak. Disamping itu, dipengaruhi pula oleh tingginya migrasi keluar NTB, khususnya penduduk di Lombok Barat, hingga saat ini. Mayoritas migran keluar dilakukan sejak tahun 1994 dengan bekerja sebagai TKI ke luar negeri, terutama ke Malaysia, Arab Saudi, Brunei Darusalam serta Abudhabi dan Kuwait. Demikian pula apabila dilihat dari tingkat pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM), di Kabupaten Lombok Barat dalam kurun waktu tahun 2000–2004 telah mengalami peningkatan, yaitu dari 56,04 menjadi 65,64.

Hal ini apabila disesuaikan dengan angka standar nasional, masih termasuk dalam kategori kesejahteraan menengah ke bawah, namun ada kecenderungan perkembangannya cukup signifikan. Berdasarkan struktur umur penduduk Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa kelompok umur 0–14 tahun proporsinya sudah mulai menurun, sedangkan pada usia produktif (15–34 tahun) serta pada kelompok lanjut usia cenderung meningkat. Turunnya proporsi penduduk 0–14 tahun ini karena semakin menurunnya fertilitas di Kabupaten Lombok Barat. Faktor inilah yang menyebabkan angka beban ketergantungan penduduk semakin rendah.

Puncak pertumbuhan ekonomi Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Lombok Barat selama periode 1990–2004 terjadi pada periode tahun 1995–1996 mencapai 8,1%. Nilai ini sama halnya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama. Sementara untuk Kabupaten Lombok Barat pada tahun 1995 tingkat pertumbuhan ekonominya mencapai 7,2%. Tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1995 diduga terkait dengan pengaruh peningkatan kegiatan investasi di sektor pariwisata dan peningkatan kunjungan kegiatan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Pada sektor pertanian sub sektor yang memberikan andil cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Lombok Barat adalah sektor pertanian tanaman pangan (padi) dan tanaman perkebunan (biji mete dan tepung caragenan). Pada sektor perdagangan kegiatan usaha yang memberikan kontribusi besar dalam kegiatan ekonomi daerah ini adalah perdagangan hasil kerajinan. Oleh karena itu, upaya mengembangkan kegiatan pariwisata di daerah ini diyakini akan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di sektor-sektor tersebut, dan pada akhirnya dapat menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Dilihat dari segi pendidikan, dalam kurun waktu 15 tahun nampak terjadi perubahan dimana penduduk yang bekerja berpendidikan rendah menurun diikuti kenaikan proporsi penduduk berpendidikan SLTP keatas, terutama SLTA mencapai 15%. Keadaan ini menunjukkan semakin membaiknya kualitas tenaga kerja yang bekerja. Besarnya angka ketergantungan penduduk dilihat dari usia penduduk yang bekerja sebagian besar pada usia produktif sedangkan penduduk usia muda (0–15), dan penduduk lansia (65+) jumlahnya sangat kecil (10%). Keadaan ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 15 tahun terakhir semakin membaik, dimana proporsi penduduk muda dan lansia yang bekerja semakin kecil (6%), yang mengindikasikan semakin baiknya tingkat kesejahteraan penduduk, oleh karena penduduk usia muda dan lansia tidak harus bekerja.

Penduduk bekerja di NTB dan Lombok Barat sebagian besar berusaha sendiri (hampir 45%) baik bekerja sendiri atau dibantu orang lain. Sebagian lagi bekerja sebagai buruh (25%) atau pekerja keluarga tidak dibayar (24%). Pada kurun waktu 15 tahun nampak terjadi perubahan dimana mereka yang bekerja sendiri terlihat menurun diikuti peningkatan mereka yang bekerja sebagai buruh. Keadaan ini mengindikasikan sulitnya mengembangkan usaha dengan berusaha sendiri, terkait dengan perkembangan perekonomian daerah pada kurun waktu tersebut. Pengangguran merupakan masalah utama di Kabupaten Lombok Barat, sementara sektor lain belum sepenuhnya dapat menampung pencari kerja. Pemerintah daerah melakukan terobosan pengiriman TKI dari Lombok Barat dan melakukan pendidikan pelatihan jenis keterampilan agar dapat menciptakan usaha mandiri. Akan tetapi, karena keterbatasan dana dan keterbatasan kemampuan para calon tenaga kerja, maka pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diharapkan mendapat dukungan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat setempat. Pengembangan Usaha kecil masih sangat terbatas, padahal sektor ini merupakan sektor penting dalam menghadapi masalah pengangguran.

Tantangan ke depan yang sangat penting menjadi perhatian pemerintah daerah setempat terkait dengan upaya peningkatan kegiatan penanaman modal di daerah ini adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal usahanya kembali ke daerah ini. Dengan dukungan pengembangan industri kecil dan pengolahan hasil pertanian yang terpadu, kegiatan usaha pendukung pariwisata akan semakin berkembang. Secara khusus dalam mengantisipasi masalah ketenagakerjaan di atas dan perkembangan ekonomi global, agroindustri dan agrobisnis perlu dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah Kabupaten Lombok Barat. Pada tataran lebih luas hal tersebut akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris. 1997. Peran Analisis Demografi dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Indonesia, dalam *Widjojo Nitisastru 70 tahun, Pembangunan Nasional: Teori, Kebijakan dan Pelaksanaan*, Moh. Arsjad Anwar (Ed), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2003. *Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)*. 2003. Jakarta: BPS
- . 2007. *Survey Angkatan kerja Nasional (Sakernas)*. 2007. Jakarta; BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok. 2005. *Kabupaten Lombok Dalam Angka*. Mataram: PBS Kabupaten Lombok
- . 2006. *Pendapatan Daerah Regional Bruto Kabupaten Lombok Barat*. Mataram: BPS Kabupaten Mataram.

- . 2005. *Kecamatan Sekotong Dalam Angka (2005)*. Mataram: BPS Kabupaten Lombok Barat.
- Ehrenberg, Ronald G. dan Robert S. Smith. 1997. *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy*, Six Edition, Addison-Wesley.
- Handayani, Titik. 2007. "Dinamika Pendidikan dalam Konteks Globalisasi dan Desentralisasi." Dalam *Pengembangan Sumber Daya Manusia: di antara Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hidayat. 1982. "Strategi Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia". Dalam Priyono Tjiptoherijanto dkk (Ed) *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: UI Press
- International Labour Office. 2000. "Decent Work and Poverty Reduction in The Global Economy, International Labour Conference". (<http://www.ilo.org>)
- Moertiningsih, S., 2005. *Bonus Demografi, Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi*, disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi UI, Jakarta 30 April 2005.
- Pranadji, Tri. 2004. "Penduduk dan Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Era otonomi Daerah". *Jurnal Analisis CSIS* 33 (4).
- UNDP. 2005. Human Development Report 2004
- Sajogyo, Pudjiwati. 1983. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta: CV. Radjawali.
- Stiglitz, Joseph E. 2006. *Dekade Kesenakahan : Era 90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia* (Seri terjemahan). Jakarta: Cipta Lintas Wacana
- Tjiptoherianto, P. dan Laila Nagib. 2008. *Pengembangan Sumber Daya Manusia: di antara Peluang dan Tantangan*, Jakarta: LIPI Press
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2007. "Dari Human Capital ke Human Development: Catatan Kritis Terhadap Perspektif Sumber Daya Manusia di Indonesia". Dalam *Pengembangan Sumber Daya Manusia: di antara Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yuliati, Yayuk & Mangku Poernomo. 2003. *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Widianto, Bambang. 2005. "Employment Creation Policy". *Conference Policy Options for an Employment Action Plan*. Jakarta, 26-27 April, Bappenas and UNSFIR.
- Widodo, YB. 2004. *The Multifunctional Role Of Agriculture And Rural Areas In Java - Indonesia: A new concept to be implemented*. Paper Presented at the ARSA International Conference on: Prospects of Asian Rural Society for the 21st Century, 26-29th March 2004, University of Mataram, Lombok -Indonesia.

- Widodo, YB. 2005. "Dinamika Pengembangan Pedesaan: Masalah Petani Gurem dan Buruh Tani di Pedesaan Jawa". *Jurnal Masyarakat Indonesia* (MI), 31 (2), 2005. Jakarta.
- Widodo, YB. dkk. 2006. "Kondisi Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Demografi dan Sosial-Ekonomi di Kabupaten Lombok Barat", Laporan Penelitian Puslit Kependudukan – LIPI, Jakarta.
- Widodo, YB. 2007. "Urban Rural Disparities And The Regeneration Of Rural Livelihoods In Java -Indonesia". Paper Presented at the Asian Rural Sociological Association (ARSA) 3rd International Conference on: Globalization, Competitiveness and Human Insecurity in Rural Asia, 8-10th August 2007, Beijing – China.